

**ANALISIS *SADD AL-DZARĪ'AH* TERHADAP TERPIDANA  
NARKOTIKA PASCA PUTUSAN MK NO. 2-3/PUU-V/2007  
TENTANG HUKUMAN MATI**

**SKRIPSI**

**Oleh  
Achmad Chasibul Kholif  
NIM. C95215067**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara  
Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Achmad Chasibul Kholif  
NIM : C95215067  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Publik Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Analisis Analisis Sadd Al-Dzari'Ah Terhadap  
Terpidana Narkotika Pasca Putusan Mk No. 2-  
3/Puu-V/2007 Tentang Hukuman Mati

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 Oktober 2019

Saya yang Menyatakan,



Achmad Chasibul Kholif

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Chasibul Kholif NIM. C95215067 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 04 Oktober 2019

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, representing the signature of Prof Dr. Titik Triwulan Tutik, MH.

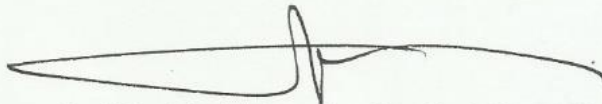
Prof Dr. Titik Triwulan Tutik, MH.  
NIP. 196803292000032001

## PENGESAHAN

Skripsi ditulis oleh Achmad Chasibul Kholif NIM. C95215067 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa 15 Oktober 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

### Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I



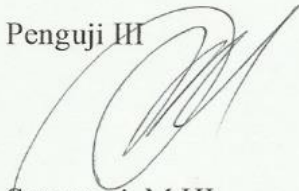
Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H  
NIP. 196803292000032001

Penguji II



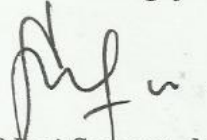
Sukamto, S.H., M.S  
NIP. 196003121999031001

Penguji III



Syamsuri, M.HI  
NIP. 197210292005011004

Penguji IV



Novi Sopwan, M.Si  
NIP. 198411212018011002

Surabaya, 22 Oktober 2019

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Achmad Chasibul Kholif  
NIM : C95215067  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum  
E-mail address : chasibulkholif@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS SADD AL-DZARI'AH TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA PASCA**

**PUTUSAN MK NO. 2-3/PUU-V/2007 TENTANG HUKUMAN MATI**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Oktober 2019

Penulis

( Achmad Chasibul Kholif )

*nama terang dan tanda tangan*

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis *Sadd al-dzari’ah* Terhadap Terpidana Narkotika Pasca Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007 Tentang Hukuman Mati” bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana hukuman mati terhadap terpidana narkotika pasca putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007 tentang hukuman mati dan bagaimana analisis *sadd al-dzari’ah* terhadap terpidana narkotika pasca putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007 tentang hukuman mati.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi dokumen (*documentary study*) yakni mengumpulkan bahan melalui buku-buku, buku-buku *fiqh*, koran, majalah, makalah, serta bahan-bahan lainnya yang ada kaitannya dengan hukuman mati terhadap terpidana narkoba. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode hukum *sadd al-dzari'ah* dengan pola pikir deduktif yaitu dengan meletakkan teori *sadd al-dzari'ah* sebagai rujukan dalam menilai mengenai hukuman mati terhadap terpidana narkoba.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007 hukuman mati terhadap tindak pidana Narkotika tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Original intent pembentuk UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28 J UUD 1945. Mengingat hukuman mati masih sangat diperlukan terhadap kejahatan yang tergolong luar biasa. Maka hukuman mati terhadap pengedar narkotika dilegalkan dalam rangka menghindari bahaya besar. *Sadd al-dzari'ah* adalah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *al-mafsadah* (kerusakan). Pelaku penyalahgunaan narkotika tergolong orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Penerapan metode hukum *sadd al-dzari'ah* terhadap kejahatan narkotika ini sudah benar, penerapan sanksi hukuman mati bagi para pengedar, dan sebagainya bukanlah bertujuan sebagai pembalasan dendam akan tetapi sebagai wujud agar para pelaku tindak pidana tersebut menjadi jera sehingga tidak muncul penyalahgunaan narkotika.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan Mahkamah Konstitusi tetap kepada kewenangannya sebagai lembaga yang mengadili Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, meskipun terdapat pemberlakuan pidana mati bagi terpidana narkoba sesuai dengan metode hukum *sadd al-dzari'ah* yang menerapkan sanksi pada hal yang sifatnya terlarang agar tidak menimbulkan *al-mafساد* (kerusakan).







## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana narkoba merupakan bagian dari kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional. Maraknya tindak pidana narkoba telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat dunia, karena disadari bahwa apabila tidak tertanggulangnya tindak pidana tersebut akan mempercepat kehancuran dunia ataupun peradaban manusia itu sendiri.<sup>1</sup> Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan.

Meningkatnya perkembangan tindak pidana di bidang narkoba dan dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sehingga mendapat perhatian masyarakat Internasional. Besarnya perhatian Internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terlihat adanya pertemuan-pertemuan Internasional maupun konferensi-konferensi Internasional di bidang narkoba yang melahirkan konvensi-konvensi Internasional.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Tatas Nur Arifin, "Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional" (Jurnal Ilmiah--Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Malang, 2013), 54.

<sup>2</sup> Kusno Adi, *Diversi sebagai upaya alternatif penanggulangan tindak pidana narkoba*, cetakan pertama (Malang: UMM Pres, 2009), 4.

Upaya penanggulangan tindak pidana narkotika adalah salah satunya dengan menerapkan pidana mati terhadap penyalahgunaan narkotika. Hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat, adapun aturan hukuma mati tertuang dalam dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Adapun pasal-pasal yang menrapkannya yaitu pasal 80 ayat (1) huruf (a) yaitu: “Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum: memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, marakit atau menyediakan narkotika Golongan 1, di pidana dengan pidana mati”. Hukuman mati juga terdapat pada ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, pasal 81 ayat (3) huruf a, serta pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a UU Narkotika.

Menurut Cesare Beccaria hukuman mati merupakan pidana yang dianggap tidak manusiawi dan tidak efektif.<sup>4</sup> Jika melihat efektifitas penjatuan hukuman mati terhadap tindak pidana narkoba yang tergolong

<sup>4</sup> Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* (Bandung: Lubuk Agung, 2011), 104.



bentuk *qhisas*, berupa balasan pembunuhan, dan dalam bentuk *ta'zir* berupa hukuman mati yang disesuaikan dengan kebijakan hukum penguasa.<sup>6</sup>

Dalam Islam hukuman mati hanya bisa ditegakkan oleh pemerintah Islam, dimana konstitusi dan undang-undang yang berlaku adalah hukum Islam. Hukuman mati hanya berlaku berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sangat ketat, seperti konteks yang melatarbelakangi terjadinya suatu tindakan pidana yang diancam hukuman mati.

Salah satu hukuman mati yang diterapkan dalam hukum Islam yaitu pada kejahatan narkoba. Menurut kajian Islam narkoba diartikan sebagai (*khamar*) minuman keras yang dapat memabukkan. Dalam perkembangan dunia Islam, *khamar* kemudian bergesekan, bermetafosa dalam bentuk yang makin canggih, yang kemudian lazim disebut narkoba atau lebih luas lagi narkoba.<sup>7</sup> Untuk itu, dalam analoginya, larangan mengonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan adalah sama dengan larangan mengonsumsi narkoba. Adapun dasar hukumnya adalah hadis Rosullah saw:

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل مسكر حمر وكل مسكر حرام (رواه مسلم)

“Dari Ibnu Umar r.a., sesungguhnya Rosullah Muhammad bersabda: Setiap yang memabukkan adalah *khamr* dan setiap yang memabukkan adalah haram. (H.R. Muslim)”.

Adapun dasar hukum bagi tindak pidana *khamr* dalam Hadis Rosullah saw:

<sup>6</sup> Makrus Munajat

<sup>7</sup> M.Arif hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah Mengatasi dan Melawan*, 88.



“Dari Mu’awiyah ia berkata: Rasulullah saw, bersabda: Barangsiapa yang minum khamr maka deralah ia, jika ia mengulangi keempat kalinya maka bunuhlah dia”. (HR. Tirmidzi).<sup>8</sup>

Pelaksanaan hukuman mati terhadap tindak pidana narkoba menurut Makrus Munajat, bila dilaksanakan orang lain yang tidak mempunyai wewenang melaksanakannya, maka ia dapat dikenai sanksi. Alasannya setiap sanksi atau hukuman itu diadakan bertujuan untuk melindungi masyarakat atau rakyat. Oleh karena penguasa negara itu wakil rakyat, maka hanya dia yang berwenang melaksanakan hukuman *ta'zir*.

Hukuman mati merupakan hukuman yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan Undang-Undang, dilaksanakannya hukuman mati adalah agar masyarakat bisa memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman sarta keamanan di suatu negara.<sup>9</sup> Hukuman mati diterapkan untuk mengantisipasi tindak pidana yang amat kejam dan pantas dihukum mati. Hal ini selaras dengan argumen mantan hakim Benjamin Mangkoedilaga yakni “Lebih baik ada ketentuan hukuman mati itu, sekalipun pelaksanaannya harus selektif. Karena hukuman mati sebenarnya dapat digunakan untuk mengantisipasi tindak pidana yang amat kejam”.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> HR. Tirmidzi No. 1472 Sunan Tirmidzi, dalam Lidwa Pusaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadits

<sup>9</sup> Robby Septiawan Permana Putra, “Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia”, *Diponegoro Law Jurnal*, No. 3 (2016), 2.

<sup>10</sup> “Hukuman Mati Harus Selektif”, *Kompas Cyber Media* (12 Januari 2000).

Indonesia di sisi lain, juga menjamin hak hidup yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 A yaitu “Setiap orang dapat berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.<sup>12</sup> Dan dipertegas dengan pasal 28 I ayat (1) yang menegaskan bahwa hak untuk hidup (*the right to life*) adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Hak hidup juga dijamin oleh pasal 6 ICCRP (*International in Civil and Political Rights*) yang berbunyi: setiap manusia berhak atas hak hidup dan mendapatkan perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu. Hal inilah yang menjadi kontroversi antara hukuman mati dengan hak hidup.

Perkembangan terkait kontroversi hukuman mati menimbulkan dua arus pemikiran terkait dengan kebijakan tentang hukuman mati di Indonesia, yakni pertama tetap dipertahankannya ketentuan hukuman mati, yang berdasarkan sanksi hukuman mati, sanksi yang diberikan adalah hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, yang

<sup>12</sup> Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945.

diharapkan dengan adanya hukuman mati tersebut agar dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku, sehingga hukuman mati masih relevan untuk diimplementasikan.<sup>13</sup>

Pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap terpidana narkoba, saat ini mengalami masalah serius dalam penanganannya. Indonesia bukan lagi sebagai negara transit/perlintasan, tetapi sebagai sarana dan pusat distribusi peredaran gelap narkoba.<sup>15</sup> Dari hasil temuan-temuan yang sering dijumpai oleh aparat penegak hukum terdapat pabrik yang terindikasi dalam jaringan sindikat internasional. Betapa ironisnya kalau kita mendengar masyarakat kita telah terjerumus kelembah sindikat narkoba, sehingga mereka dikhawatirkan terkena strategi global untuk menghancurkan budaya atau generasi muda Indonesia. Tindakan mereka itu dianggap tidak sebanding untuk membalas perbuatannya, maka hukuman mati dianggap hukuman yang pantas dan setimpal atas perbuatan mereka.

Banyak pola pemikiran dalam Islam yang banyak berimplikasi pada aspek hukum Islam, baik secara metodologis maupun wacana. Oleh karena itu, metode hukum Islam merupakan sebuah metode yang cocok digunakan dalam menyelesaikan pada suatu permasalahan. Melihat banyaknya kontroversi hukuman mati, amatlah penting untuk menghadirkan pembahasan masalah hukuman mati ini dari perspektif *sadd al-dzari'ah*. *Sadd al-dzari'ah* adalah pelarangan atas apa saja yang pada dasarnya itu dibolehkan dilakukan, agar dia tidak mengarah kepada yang tidak boleh

<sup>15</sup> Bungasan Hutapea, *Kontroversi Penjatuan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum dan Hukum Asasi Manusia* (Jakarta: Pohon Cahaya, 2016), 63.



dilakukan.<sup>16</sup> Adapun *sadd al-dzari'ah* sendiri merupakan sebuah metode yang bersifat preventif dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif.

Jumhur ulama menempatkan posisi metode ini dalam hukum islam adalah sebagai pengatur tentang perilaku atau perbuatan yang mengandung aspek hukum yang belum dilakukan manusia dalam rangka menjaga agar tidak terjatuh dalam dampak negatif dalam melakukannya. Dasar pegangan jumhur ulama untuk menggunakan metode ini adalah kehati-hatian dalam menghadapi pembenturan antara masalah dan mafsadat. Bilah maslahat dominan maka boleh dilakukan, dan bila mafsadat yang dominann, maka harus ditinggalkan. Namun, jika sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus mengambil prinsip yang berlaku.<sup>17</sup> Hal ini bukan berarti sebagai sebuah upaya pengekangan, akan tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan.

Mengenai hak asasi manusia dalam kehidupan demokrasi kita, terasa makin mencuat, meski pemahaman terhadap HAM belum memuaskan karena beragamnya konsepsi dari masyarakat. Hak asasi manusia yang bersifat kodrati pada hakikatnya berisi pesan moral yang menghendaki setiap masyarakat harus menghormati dan melindunginya.<sup>18</sup> Pesan moral yang ada, memang belum mengikat secara hukum untuk dipaksakan pada setiap orang.

<sup>16</sup> Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Maqasid Syari'ah al-Islamiyyah* (Petaling Jaya Malaysia: Dar An-Nafais, 2001), 365.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 430.

<sup>18</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

## B. Identifikasi Masalah

1. Penetapan hukuman mati bagi terpidana narkoba
2. Hukuman mati terhadap terpidana narkoba menurut putusan No. 2-3/PUU-V/2007
3. Hak Asasi Manusia
4. Kategori penghukuman mati menurut Islam



2. Regulasi non derogable rights: studi tentang hak hidup dan relasinya dengan konsepsi hukuman mati dalam hukum positif dan hukum Islam oleh Norma Eryna. Skripsi ini lebih fokus pada tentang deskripsi materi hak hidup dalam regulasi Non-Derogable Rights.<sup>20</sup> Adapun kelebihan dalam penelitian ini yakni berisi materi hak hidup dalam regulasi Non-Derogable Rights serta penjelasan rinci mengenai relasi antara hak hidup dengan konsep hukuman mati dalam hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan penelitian dalam skripsi ini yang membedakan adalah penelitian ini juga mengkaji metode hukum islam yaitu *sadd al-dzari'ah* pasca putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>20</sup> Norma Eryna, "Regulasi Non Derogable Rights: Studi Tentang Hak Hidup dan Relasinya dengan Konsepsi Hukuman Mati dalam Hukum Positif dan Hukum Islam" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2006), 7.



## G. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Dari segi akademis/teoritis, diharapkan berguna bagi akademisi dan kajian pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, menyempurnakan dan memperkaya khasanah pengetahuan tentang hukuman mati bagi terpidana narkoba pada sistem hukum positif di Indonesia dalam perspektif *sadd al-dzari'ah*.
2. Dari segi praktis, diharapkan berguna sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat, terpidana narkoba, aparat, pengguna narkoba. Dan juga para praktisi hukum dalam memutuskan perkara hukum maupun dalam memberikan fatwa hukum pada sosial masyarakat.

## H. Definisi Operasional

1. *Sadd Al-Dzari'ah*

Suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.<sup>21</sup>

## 2. Terpidana Narkotika

Orang yang tanpa hak dan melawan hukum: memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, marakit atau menyediakan narkotika yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.<sup>22</sup>

### 3. Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pidana Mati

Putusan ini menguji Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yakni ancaman pidana mati yang terdapat dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, Pasal 81 ayat (3) huruf a, serta Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a UU Narkotika yang bertentangan dengan hak hidup dalam UUD 1945 Pasal 28 A dan 28 I.

## I. Metode Penelitian

Penelitian mengenai Analisis *Sadd al-dzari'ah* Terhadap Terpidana Narkotika Pasca Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007 Tentang Hukuman Mati

<sup>21</sup> Andewi Suhartini, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 156.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.















Menurut Asnawi di dalam bukunya “Perbandingan *Ushul Fiqh*” menerangkan bahwa yang di maksud dengan *sadd al-dzari’ah* secara umum diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan itu di maksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. Metode ini bersifat preventif. Artinya, segala sesuatu yang mubah tetapi akan membawa kepada perbuatan haram maka hukumnya menjadi haram.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 142.

menyatakan bahwa *dzari'ah* tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang tetapi juga yang dianjurkan.<sup>4</sup>

Menurut asy-Syaukani, *al-dzari'ah* adalah masalah atau perkara yang dibolehkan namun akan mengakibatkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mazhur*). Menurut Mukhtar Yahya dan Faturrahman, *al-dzari'ah* adalah menutup jalan perbuatan yang dilarang.<sup>5</sup>

Dari berbagai uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *sadd al-dzari'ah* merupakan pencegahan suatu perbuatan yang dilarang agar samapai menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Penggunaan terhadap mafsadah dilakukan karena ia bersifat terlarang. Adapun tujuan dari *sadd al-dzari'ah* adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan.

## 2. Kedudukan *Sadd Al-Dzari'ah*

Sebagaimana halnya dengan *qiyas*, dilihat dari aspek aplikasinya, *sadd al-dzari'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (*istinbath al-hukum*) dalam hukum Islam. Namun dilihat dari sisi produk hukumnya, *sadd al-dzari'ah* adalah salah satu sumber hukum.

Tidak semua ulama sepakat dengan *sadd al-dzari'ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklarifikasikan dalam tiga golongan, yaitu a) yang

<sup>4</sup> Syafe'i Rahman, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 132.

<sup>5</sup> Muklat Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islam* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), 347.



Golongan kedua, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Contoh kasus Imam Syafi'i menggunakan *sadd al-dzari'ah*, adalah ketika beliau melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke perkebunan atau sawah. Hal ini menurut beliau akan menjadi sarana (*dzari'ah*) kepada tindakan mencegah memperoleh sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan juga *dzari'ah* kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah.<sup>6</sup>

Golongan ketiga, yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Zahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (*zahir al-lafzh*). Dengan demikian, bagi mereka konsep *sadd al-dzari'ah* adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada *nash* secara langsung.

Ibnu Hazm (994-1064 M), salah satu tokoh utama dari mazhab Zahiri, bahkan menulis satu pembahasan khusus untuk menolak metode *sadd al-dzari'ah* dalam kitabnya *Al-Aḥkam fi Uṣul Al-Aḥkam*. Penolakan terhadap *sadd al-dzari'ah* merupakan kehati-hatian dalam

[illegible]

beragama. *sadd al-dzari'ah* merupakan anjuran untuk menjaga kehormatan agama dan jiwa agar tidak tergelincir pada hal-hal yang dilarang.<sup>7</sup>

### 3. Dasar Hukum *Sadd Al-Dzari'ah*

a. QS. Al-an'am (6): 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

“Dan janganlah kamu memaki sembahsan-sembah yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”.

Mencaci maki berhala tidak dilarang Allah Swt., tetapi ayat ini melarang kaum muslimin mencaci dan menghina berhala, karena larangan ini dapat menutup pintu atau menutup jalan ke arah tindakan orang-orang musyrik mencaci dan memaki Allah secara melampaui batas. Maka perbuatan mencaci dan menghina itu menjadi dilarang.<sup>8</sup>

b. QS. Al-Baqarah (2): 104

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رُعِنَا وَفُولُوا أَنْظِرْنَا وَاسْمِعُوا<sup>٢٤</sup> وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih”

Adanya larangan mengucapkan kata *ra'ina* oleh orang-orang Yahudi di dimanfaatkan untuk mencaci maki Nabi untuk itu dilarang

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 91.

### c. Hadis Nabi

“Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan engkau kepada sesuatu yang tidak meragukanmu.” (HR. At-Tirmidzi)

Dasar penggunaan *sadd al-dzari'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi permasalahan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat yang dominan maka boleh dilakukan. Apabila mafsadat yang dominan, maka harus di tinggalkan. Bila sama kuatnya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, uaitu sebagaimana kaidah fikih:

“ Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya ”

“Menolak kerusan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”

Karena itulah, *sadd al-dzari'ah* pun bisa disandarkan kepadanya.

<sup>9</sup> Sirajuddin, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur* (Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2013), 130.

4.

- 4.

*Dzari'ah* bila dari akibat (dampak) yang ditimbulkan menurut Ibnu  
 syyim, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin terbagi menjadi  
 t macam, yaitu<sup>10</sup>:

- <sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 402.

c. *Dzari'ah* yang semula untuk sesuatu yang mubah. Seperti berhias bagi wanita yang menjalani iddah ditinggal mati suaminya. Berhias itu pada dasarnya boleh, tapi berhiasnya wanita iddah seperti itu keadaannya menjadi lain.

d. *Dzari'ah* yang semula untuk sesuatu yang mubah, namun keburukannya lebih kecil daripada kebaikanannya. Contohnya seperti melihat wanita saat meminum/khitbah.

## 1. Pengertian Narkotika

Sedangkan menurut istilah narkotika merupakan obat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. William Bentin mengartikan narkotika sebagai sejenis zat yang dapat melemahkan atau membius atau mengurangi rasa sakit.

[illegible]

Pengertian narkoba menurut Undang-undang No. 22 tahun 1997 :  
narkoba adalah zat atau obat berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba merupakan bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman, yaitu: Candu, Kokain, dan Ganja. Sedangkan menurut istilah lain dari narkoba adalah NAPZA yang merupakan kepanjangan dari narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif.<sup>13</sup> Semua bentuk narkoba benda-benda atau zat kimia yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi orang yang mengonsumsinya.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Soedjono, *Ptologi Sosial* (Bandung: Alumni Bandung, 1997), 78.

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 11.

<sup>14</sup> Zahroni, *Pencegahan Penyalagunaan NAPZA* (Jakarta: Grafindo Awanawan, 1980), 13.





Secara bahasa *khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya tertutup, menutup atau dapat juga diartikan kalut.<sup>17</sup> Menurut etimologi, dinamakan *khamr* karena ia mengacaukan akal, oleh karena itu secara bahasa *khamr* meliputi semua benda-benda yang dapat megacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Maka *khamr* di samping diartikan sesuai dengan bendanya juga akibat dan pengaruhnya bagi siapa saja menggunakannya.<sup>18</sup> *Khamr* adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang potensial memabukkan dan bisa digunakan untuk mabuk-mabukkan. *Khamr* menagndung zat alkohol yang menjadikan pengguna mabuk.<sup>19</sup> Oleh karena itu makanan ataupun minuman yang dapat menyebabkan seseorang tertutup akalnya atau mabuk disebut *khamr*.

Esensi yang terkandung dalam *khamr* yang dapat merusak akal, seseorang para ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (*khamr*, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putaw dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan pikiran dan akal pikirannya adalah haram.<sup>20</sup> Termasuk diantaranya adalah

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 289.

Meskipun benda-benda terlarang seperti narkoba atau sejenisnya secara khusus dalam Islam belum ada sanksinya, namun benda-benda tersebut masuk dalam kategori *khamr* karena sama-sama dapat mengakibatkan terganggunya kerja urat saraf dan dapat menyebabkan ketergantungan.<sup>22</sup> Dasar hukum pengharaman narkoba terdapat didalam al-Quran, Surat al-Maidah Ayat 90, yaitu:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.

[illegible]



Dalam hukum pidana Islam disebut dengan *jinayah*. *Jinayah* merupakan tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal. Sebagian fuqaha menggunakan kata *jinayah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Yusuf Qarawadhi, *Halal Haram dalam Islam* (Surakarta: Sinar Grafika, 2003), 109.

[illegible]





(pembunuhan terencana), maka dia harus dihukum mati melalui metode yang sesuai dengan cara dia membunuh. Pembunuhan sengaja dalam syariat Islam diancam dengan berbagai hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan.<sup>28</sup>

c. Hukuman mati pidana *ta'zir*

Dalam pidana *ta'zir* hukuman mati bisa saja diberlakukan jika hukuman mati dianggap mampu atau menjadi satu-satunya cara memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.<sup>29</sup> Hukuman mati dalam *ta'zir* tidak diatur dalam *nash* (al-Qur'an dan hadis), namun kewenangan diserahkan sepenuhnya kepada penguasa, dimana kadar hukumnya tidak dibatasi. Misalnya, hukuman mati bagi mata-mata, residivis, pengedar narkoba, atau koruptor.

Dalam hukum Islam, hukuman mati yang diberlakukan untuk kasus-kasus tertentu, seperti narkoba, terorisme, dan korupsi, termasuk kategori hukuman *ta'zir* yang disebut dengan *al-qatlu al-siyāsi*, yaitu hukum yang tidak diatur dalam al-Qur'an dan al-Sunnah hanya menggambarkan pola pengaturan pidana terhadap kondisi masyarakat yang belum memiliki kompleksitas permasalahan seperti sekarang ini. Dengan situasi masyarakat yang sangat kompleks saat ini, baik

<sup>28</sup> Abdul Jalil Salim, *Polemik Hukuman Mati di Indoneisa* (Cet. 1; Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 319.

<sup>29</sup> A. Rahmat Rosyadi, H.M Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2006), 9.

Seluruh aturan dalam ajaran Islam, baik yang bersifat perintah, larangan, kebolehan, anjuran ataupun sesuatu yang harus dihindari. Pada dasarnya bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Tidak ada satu pun perintah kecuali untuk kebaikan, dan tidak ada satu pun larangan kecuali memang perbuatan tersebut akan merusak. Ada lima hal pokok kemaslahatan yang harus senantiasa terjaga dan terpelihara, sebab jika tidak, kehidupan manusia akan rusak, kacau dan tidak menentu. Kelima hal pokok ini disebut dengan kebutuhan *dharuriyat* yang mencakup keselamatan jiwa dan raga, akal pikiran, nasab/keturunan, keselamatan kepemilikan harta, dan keselamatan ajaran agama.<sup>30</sup>

Syariat Islam mengharamkan *khamr* kurang lebih sejak 14 abad yang lalu dan hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugra Allah Swt., yang harus dipelihara sebaik-baiknya dan ternyata di zaman mutakhir seperti sekarang ini manusia mulai menyadari diharamkannya *khamr* ternyata membawa *mudharat* (dampak negatif) bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri.

Pidana narkotika tergolong orang yang membuat kerusakan dimuka bumi. Karenanya hukuman bagi mereka yang membuat kerusakan di muka bumi adalah hukuman sesuai kebijakan pemerintah Islam. Hukuman

[illegible]

Hukuman mati dalam pidana yang menggunakan *ta'zir* ulama mempunyai beberapa pendapat. Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang. Malikiyah membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* untuk *jarimah-jarimah ta'zir* tertentu, yaitu melakukan kerusakan di muka bumi. Sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan hukuman mati dengan *ta'zir* dalam kasus menyimpang dari ajaran al-Qur'an dan hadits.

Kebanyakan fuqaha mazhab Hanafiyah memperbolehkan hukuman mati terhadap *khamr* sebagai dan menyebutnya pembunuhan dikarenakan motif politik. Beberapa ulama mazhab Hanabilah terutama Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim serta beberapa muridnya juga mendukung pendapat tadi. Pendapat tersebut juga didukung oleh beberapa ulama Malikiyah. Adapun pendapat ulama mazhab tentang hukuman narkoba adalah dari

[illegible]

Selain itu Dailami pernah bertanya kepada Ibnu Taimiyah tentang orang yang tidak mau berhenti dari minum khamr. Beliau menjawab, “Siapa yang tidak mau berhenti dari minum khamr, bunuhlah”. Dalam karya beliau yang lain, Ibnu Taimiyah mengatakan tentang alasan bolehnya *ta'zir* dengan membunuh, “Orang yang membuat kerusakan seperti ini seperti orang yang menyerang kita, jika orang yang menyerang ini tidak bisa dihindarkan kecuali dengan dibunuh maka dia dibunuh”.<sup>33</sup>

Para ulama ahli sunnah berpendapat bahwa pengedar narkoba itu berhak mendapatkan hukuman mati. Dengan pertimbangan bahwa orang tersebut termasuk orang yang merusak di muka bumi. Sehingga bahaya yang mengancam agama dari orang tersebut lebih gawat dibandingkan bahaya racun bagi badan.

<sup>33</sup> Rachanul Bahraen, “Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba”, dalam <http://www.alifta.net/Fatwa/FatawaChapters.aspx?view=Page&PageID=3101&PageNo=1&BookID=2>, diakses pada 02 Oktober 2019.



”pidana mati tak dapat diterima. Sebab di pengadilan putusan hakim biasanya didasarkan pada alasan-alasan yang rasional dan benar.”<sup>1</sup>

Menurut Lambroso dan Garofalo berpendapat bahwa pidana mati itu adalah alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Individu itu tentunya adalah orang-orang yang melakukan kejahatan yang luar biasa serius (*extraordinary crime*). Pada kesempatan lain, Suringa berpendapat pidana mati merupakan suatu bentuk hukuman yang sangat dibutuhkan dalam suatu masa tertentu terutama dalam hal transisi kekuasaan yang beralih dalam waktu yang singkat. Penulis beragumen seperti didasarkan pendapat Suringa yang menyatakan bahwa pidana mati adalah suatu alat pembersih radikal yang pada setiap masa revolusioner kita cepat dapat mempergunakannya.<sup>2</sup>

Selanjutnya, inkonstitusioanal atau tidaknya pidana mati sebenarnya telah terjawab dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada Permohonan Pengujian materil Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang- Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh empat terpidana mati kasus narkotika melalui kuasa hukumnya berkenaan dengan inkonstitusionalitas pidana mati yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa ancaman pidana mati pada Undang- Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika tidaklah

<sup>1</sup> Pasal 183 KUHP.

<sup>2</sup> Winkel Suringa, Inleiding Tot De Studie van het Nederlandf Strafrecht, H.D., T.W & Zoon N.V.Haarlem., 1968.





Menurut pendapat Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan menitikberatkan pada konsep hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan perkembangan penolakan terhadap pidana mati dewasa ini (masa sebelumnya penolakan pidana mati ditekankan atas pelaksanaan eksekusi yang kejam dan efektivitas pidana mati tersebut).

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>4</sup>

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap

[illegible]

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang ada setelah adanya amandemen UUD 1945. Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan: Pertama, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Kedua, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Ketiga, di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.<sup>6</sup>

Pada hakikatnya, fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten (*the guardian of constitutions*) dan menafsirkan konstitusi atau UUD (*the interpreter of constitution*). Dengan fungsi dan wewenang tersebut, keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki arti penting dan peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan dewasa ini karena segala ketentuan atau kebijakan yang

<sup>6</sup> Ibid, 221.

dibuat penyelenggara negara dapat diukur dalam hal konstitusional atau tidak oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>7</sup>

Sebagai sebuah lembaga yang telah ditentukan dalam UUD, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diberikan dan diatur dalam UUD. Kewenangan yang mengeksklusifkan dan membedakan Mahkamah Konstitusi dari lembaga-lembaga lain. Wewenang Mahkamah Konstitusi secara khusus diatur dalam Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 10 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2005 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Misalnya, usul pemberhentian presiden dan/atau wapres oleh DPR kepada MPR apabila Presiden dan/atau wapres terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 A UUD 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan hasil pemilu.<sup>8</sup>

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 24 C Ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 10 Ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutus terhadap pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wapres telah

<sup>7</sup> Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Depok: Prenadamedia Group, 2017), 629.

<sup>8</sup> Ibid., 629.

melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 A UUD 1945.”

Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, artinya dalam hal pelaksanaan kewenangan ini tidak ada mekanisme banding atau kasasi terhadap putusan yang dibuat Mahkamah Konstitusi untuk perkara-perkara yang berkenaan dengan kewenangan tersebut.

C. Hukuman Mati dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007

## 1. Duduk Pokok Perkara

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

a. Para pemohon Perkara Nomor 2/PUU-V/2007:

- 1) Edith Yunita Sianturi, beralamat di Jalan Wijaya Kesuma IX/87,  
RT 09/06, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas,  
Depok, sebagai PEMOHON I;

- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 18 dan 20 Oktober 2006 memberi kuasa kepada Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M., Ir. Alexander Lay, S.H., LL.M., dan Arief Susijamto Wirjohoetomo, S.H., M.H dan memilih domisili hukum di kantor kuasa hukum tersebut, beralamat di Mayapada Tower (d/h Wisma Bank Dharmala), Lantai 5, Jalan Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon I;

1) Scott Anthony Rush, Alamat Lembaga Permasalahatan Kerobokan, Jalan Tangkuban Perahu, Denpasar (dahulu di 42 Glenwood St. Chelmer, Brisbane, Australia). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2007 memberi kuasa kepada Denny Kalimang, S.H., M.H., Harry Ponto, S.H., LL.M., J. Robert Khuana, S.H., Benny Ponto, S.H., M.H., Victor Yaved Neno, S.H., M.H., M.A., dan Drs. I Ketut Ngastawa, S.H., kesemuanya Advokat

Para Pemohon I telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 16 Januari 2007 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Januari 2007, dengan registrasi Perkara Nomor 2/PUU-V/2007, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan pada tanggal 14 Februari 2007, dan Pemohon II, telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 30 Januari 2007, dengan registrasi Perkara Nomor 3/PUU-V/2007, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2007.<sup>9</sup>

a. *Legal Standing* Pemohon III dan IV

Pemohon III dan IV adalah Warga Negara Australia yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, terkait dengan tindak pidana yang diatur dengan UU Narkotika. Di sisi lain, Pasal 51 Ayat (1) huruf a UUMK memberikan batasan bahwa perorangan yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang terhadap

[illegible]



Ayat (1) huruf a UUMK:

a.perorangan warga negara Indonesia;  
...dst”.

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

[illegible]

Para Pemohon adalah Terpidana Mati yang telah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara tindak pidana yang diatur dengan UU Narkotika di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Berdasarkan putusan-putusan di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, para Pemohon dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana mati.

Meskipun putusan hukuman mati tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), namun terhadap diri para Pemohon masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Wanita (Dewasa) Tangerang (Pemohon I dan II) dan Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Denpasar (Pemohon III dan IV).

Hukuman mati tersebut jelas sangat merugikan kepentingan dan hak konstitusional para Pemohon yaitu hak para Pemohon untuk hidup yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, yaitu UUD 1945. Dengan dijatuhi hukuman pidana mati maka hak untuk hidup para Pemohon yang secara tegas dijamin keberadaannya oleh Pasal 28 A dan Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945 telah dilanggar.

[illegible]

### 3. Pertimbangan Hukum

a. Kewenangan Mahkamah

Pengujian oleh para Pemohon adalah UU Narkotika yang diundangi pada tanggal 1 September 1997, sebelum Perubahan Pertama UUD 1945 tanggal 19 Oktober 1999. Akan tetapi, karena Pasal 50 UUD 1945 beserta penjelasannya yang dapat menjadi penghalang pengujian UU Narkotika tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004,

[illegible]



- Dua orang WNI sebagai Pemohon dalam Perkara Nomor 1/V/2007 yakni Edith Yunita Sianturi dan Rani Andrian (Aprilia) mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945 (hak untuk hidup yang bersifat *derogable*) yang secara aktual dirugikan oleh adanya ketentuan pidana mati dalam UU Narkotika, sebab kedua Pemohon *a quo* telah dipidana mati oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

Sebagaimana telah diuraikan di atas, permohonan *a* diajukan oleh tiga orang warga negara asing (WNA), yaitu Anthony Rush, Myuran Sukumaran, dan Andrew Chan. Mahkamah terlebih dahulu harus juga mempertimbangkan

Menimbang bahwa tentang kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon WNA dalam perkara *a quo*, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- 1) Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK beserta penjelasannya tegas dan jelas (*expressis verbis*) menyatakan bahwa person yang berhak mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 (yang berarti yang mempunyai kedudukan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945) hanya WNI, tidak berhak.
- 2) Tidak dimungkinkannya WNA mempersoalkan suatu Undang-Undang Republik Indonesia tidak berarti bahwa WNA memperoleh perlindungan hukum menurut prinsip *due process of law, in casu* dalam hal ketentuan pidana mati di mana Peradilan tetap dapat melakukan upaya hukum (*legal remedies*)

sama warga negara Indonesia”. Dengan demikian, Pemohon WNA tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 51 Ayat (1) huruf a beserta penjelasannya, sehingga para pemohon WNA tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*.

Dengan kata lain, para Pemohon WNA telah keliru menafsirkan Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK, yaitu bahwa para Pemohon *a quo*, oleh karena tidak ada kata “Indonesia” pada penjelasan Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK tersebut, maka berarti WNA pun memiliki kedudukan hukum untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 karena para WNA dimaksud termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. Pendapat Pemohon yang demikian telah di luar konteks Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK. Karena dijelaskan oleh Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK tersebut adalah pengertian kata “perorangan” dalam Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK berbunyi, “a. perorangan warga negara Indonesia”. Sehingga, yang dimaksud oleh kalimat “termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama” dalam Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK adalah kelompok orang warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan sama.

Demikian, karena para Pemohon warga negara asing tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka *mutatis mutandis* Pokok Pemohon III dan Pemohon IV untuk



### c. Pokok Permohonan

Pemohon I dan II Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 (selanjutnya disebut para Pemohon) telah mendalilkan pasal-pasal UU Narkotika yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945, yakni:

“Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati...”

“Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati...”

“Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati...”

[illegible]



Pemohon tiba pada kesimpulan bahwa pidana mati tidak k  
(*incopatible*) dengan hak untuk hidup. Kemudian  
memperbandingkan *non-derogable rights* dalam  
ketentuan ICCPR dengan ketentuan dalam Pasal 28 I Aya  
1945, para Pemohon berkesimpulan bahwa keduanya  
kesamaan. Bahkan, para Pemohon beroendapat bahwa UU  
*casu* Pasal 28 I Ayat (1), menerapkan standar yang lebih  
ICCPR.

2) Pasal 28 I Ayat (4) UUD 1945:

Dalam hubungan ini para Pemohon mendasarkan  
pada argumentasi perihal ketidaksempurnaan sistem

2) Pasal 28 I Ayat (4) UUD 1945:

Dalam hubungan ini para Pemohon mendasarkan pada argumentasi perihal ketidaksempurnaan sistem

Dalam hubungan ini para Pemohon mendasarkan pada argumentasi perihal ketidaksempurnaan sistem pidana. Sebagai akibatnya, selalu terdapat kesalahan di hukumannya orang-orang yang tidak bersalah. Sementara hukuman mati bersifat *irreversible*, sehingga seseorang yang telah dinyatakan bersalah dan telah dieksekusi bila kemudian orang itu ternyata tidak bersalah, kekeliruan demikian menjadi fatal karena tidak mungkin lagi untuk diperbaiki.



Dengan memperhatikan sifat *irrevocable* pidana mati, terlepas dari pendapat Mahkamah perihal tidak bertentangnya pidana mati dengan UUD 1945 bagi kejahatan-kejahatan tertentu dalam UU Narkotika yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *aquo*, Mahkamah berpendapat bahwa ke depan, dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal berikut:

- 1) Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
- 2) Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;

[illegible]













Sejarah penyusunan Pasal 28 I UUD 1945, sebagaimana diterangkan pada persidangan tanggal 23 mei 2007 oleh Lukman Hakom Saefuddin, mantan anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR (PAH I BP MPR) yang bertugas menyiapkan rancangan perubahan UUD 1945, yang pada intinya menerangkan bahwa tatkala merumuskan Bab X A (Hak Asasi Manusia) rujukannya atau yang melatarbelakanginya adalah Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Dari ketetapan MPR tersebut kemudian lahir Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

[illegible]

Dari uraian keterangan di atas bahwa dilihat dari perspektif original intent pembentuk UUD 1945, seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab X A UUD 1945 keberlakuannya dapat dibatasi. Original intent pembentuk UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi juga diperkuat oleh penempatan Pasal 28 J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab X A UUD 1945 tersebut. Jadi, secara penafsiran sistematis, hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28 J UUD 1945.

Kebolehan untuk memberlakukan pidana mati itu adalah terbatas pada “kejahatan-kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut”. Memberlakukan pidana mati pada sejumlah tindak pidana tertentu dalam UU Narkotika tidak bertentangan dengan konstitusi maupun hukum Internasional.

UU Narkotika adalah implementasi kewajiban hukum Internasional yang lahir dari perjanjian Internasional, *in casu* Konvensi Narkotika dan Psikotropika, sebagaimana ditegaskan pada konsiderans “Mengingat” angka 4 dan Penjelasan Umum alinea ke-4 UU Narkotika. Salah satu kewajiban hukum Internasional yang timbul dari keikutsertaan Indonesia dalam

<sup>1</sup> Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, 412.

Kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika dikatakan sebagai kejahatan-kejahatan yang sangat serius (*particularly serious*) diperbandingkan dengan kejahatan-kejahatan yang selama ini telah diterima sebagai kelompok kejahatan paling serius (*the most serious crimes*), seperti kejahatan genosida (*genocide crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), maka secara substantif tidak terdapat perbedaan diantara kedua kelompok kejahatan itu.

Pemberlakuan pidana mati terhadap kejahatan-kejahatan yang diatur dalam pasal-pasal UU Narkotika yang dimohonkan pengujian, disamping sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara pihak (*state party*) seperti diuraikan pada huruf (h), juga didukung oleh ketentuan Pasal 24 Konvensi

[illegible]





adalah kewajiban asasi untuk menghormati hak orang lain dan hukum adalah penyeimbang antara hak dan kewajiban tersebut.

**B. Analisis *Sadd Al-Dzari'ah* terhadap Terpidana Narkotika Pasca Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007 Hukuman Mati**

Pada dasarnya semua hukum *syari'at* yang ditetapkan oleh Allah Swt., pada umat manusia ditujukan untuk kemaslahatan dan menolak kerusakan. Konsep pembebanan *syari'at* (taklif) memiliki dua dimensi pencapaian yaitu *maqashid* (tujuan utama) dan *wasail* (perantara tujuan).<sup>3</sup>

Metode hukum Islam *sadd al-dzari'ah* adalah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *al-mafsadah* (kerusakan). Kerusakan yang dimaksud agar tidak sampai menimbulkan *al-mafsadah* (kerusakan). Kerusakan yang dimaksud adalah hal yang bersifat mubah atau haram. Jika perbuatan tersebut akan menimbulkan *al-mafsadah*, maka pencegahan terhadap *mafsadah* dilakukan karena perbuatan itu bersifat terlarang. Dasar hukum *sadd al-dzari'ah* ada tiga, yakni al-Qur'an, sunnah dan kaidah *fiqh*. Dalam al-Qur'an dijelaskan melalui surah al-An'am ayat 108, yang berbunyi:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sembahsan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan

<sup>3</sup> Pokja Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam* (Kediri: Purna Siwa Aliyyah, 2004), 299.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 2-3/PUU-V/2007 hukuman mati bertentangan dengan UUD 1945, penyalahgunaan narkoba di anggap sebagai kejahatan luar biasa dan hukumannya adalah hukuman mati. Dari putusan tersebut jika ditinjau dengan *sadd al-dzari'ah* penerapan hukuman mati adalah sudah benar karena bersifat pencegahan terhadap kejahatan Narkoba yang sangat berbahaya. Jika dilihat secara terperinci, penentuan hukuman mati merupakan penutup (*sadd*) agar para calon tindak pidana narkoba yang hendak menyalahgunakan tidak sampai melakukan tindak pidana narkoba. Sedangkan *al-dzari'ah* (wasilah) terhadap tindak pidana narkoba dengan menerapkan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia dengan hukuman mati.

[illegible]



Pelaku penyalahgunaan narkoba tergolong orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Karenanya hukuman bagi mereka yang membuat kerusakan dimuka bumi adalah salah satu dari empat hukuman sesuai kebijakan pemerintah Islam. Sebagaimana firman Allah Swt., dalam surat al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

[illegible]



Adapun pendapat ulama yang setuju menerapkan sanksi *ta'zir* terhadap penyalaguna narkotika, salah satunya adalah Wahbah al-Zuhaili menjelaskan: “diharamkan setiap yang dapat menghilangkan akal (mabuk) walaupun tanpa diminum seperti ganja, opiate karena jelas-jelas berbahaya. Adalah orang Islam telah melarang hal-hal yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain, tetapi dikenakan sanksi had bagi pelakunya, penyalahgunaan narkotika, karena mengandung adiksi karena itu hukumannya adalah *ta'zir*”.

[illegible]





## PENUTUP

Berdasarkan penjelasan penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 76

hukum *sadd al-dzari'ah* yang menerapkan sanksi pada hal yang si terlarang agar tidak menimbulkan *al-mafsadah* (kerusakan).

hukum *sadd al-dzari'ah* yang menerapkan sanksi pada hal yang si terlarang agar tidak menimbulkan *al-mafsadah* (kerusakan).

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Kusno. *Diversi sebagai upaya alternatif penanggulangan tindak pidana narkotika*, cetakan pertama. Malang: UMM Pres, 2009.
- Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Syatibi, Imam. *al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Arifin, Tatas Nur. "Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional". Jurnal Ilmiah--Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Malang, 2013.
- Ariyulinda, Nita. "Hukuman Mati Narapidana Narkoba dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Rechts Vinding*, Desember, 2014.
- Asnawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Asy-Safi'i, Muhammad bin Idris. *al-Umm*, juz VII, dalam kitab *Digital al-Akbar*.
- Asyur, Muhammad Thahir Ibn. *Maqasid Syari'ah al-Islamiyyah*. Petaling Jaya Malaysia: Dar An-Nafais, 2001.
- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Cetakan Pertama. Bandung: CV Mandar Maju, 1995.
- Bahraen, Raehanul. "Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba", dalam <http://www.alifta.net/Fatwa/FatawaChapters.aspx?view=Page&PageID=3101&PageNo=1&BookID=2>, diakses pada 02 Oktober 2019.
- Bik, Muhammad Khudori. *Ushul Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Usul Fiqh*. Jakarta: Kencana Group, 2014.
- Eryna, Norma. "Regulasi Non Derogable Rights: Studi Tentang Hak Hidup dan Relasinya dengan Konsepsi Hukuman Mati dalam Hukum Positif dan Hukum Islam". Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2006.
- Firdaus. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2004.

- Hakim, M. Arif. *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah Mengatasi dan Melawan*. Bandung: Penerbit Nuansa, 2004.
- Hamzah, Andi. *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Hasan, Hamzah. *Hukum Pidana Islam I*. Cet. I. Makassar: Alaudin University Press, 2014.
- Hidayat, Anwar . “Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail” dalam <https://www.google.com/amp/s/www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html>, diakses pada 24 Juni 2019.
- HR. Tirmidzi No. 1472 Sunan Tirmidzi, dalam Lidwa Pusaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadits
- Husain, Adian. *Rajam Dalam Arus Syahwat*. Cet 1. Jakarta: Pustaka Kautsar, 2001.
- Hutapea, Bungasan. *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum dan Hukum Asasi Manusia*. Jakarta: Pohon Cahaya, 2016.
- Lubis, Todung Mulya. *Kontroversi Hukuman Mati*. Jakarta: Buku Kompas, 2009.
- Munajat, Makrus. *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Longung Agung, 2004.
- , *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Munir, Misbahul. “Fatwa Hukuman Mati Dalam Perspektif Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”. Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Grealia Indonesia, 1998.
- Pokja Forum Karya Ilmiah. *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*. Kediri: Purna Siwa Aliyyah, 2004.

- Putra, Robby Septiawan Permana. "Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia". *Diponegoro Law Jurnal*, No. 3, 2016.
- Qarawadhi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*. Surakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Rahman, Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Rosyadi, A. Rahmat dan H.M Rais Ahmad. *Formulasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2006.
- Sadly, Hasan. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2000.
- Salim, Abdul Jalil. *Polemik Hukuman Mati di Indoneisa*. Cet. 1. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010.
- Sanusi, Ahmad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sirajuddin. *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur*. Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2013.
- Soedjono. *Patologi Sosial*. Bandung: Alumni Bandung, 1997.
- Soesilo, R. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politea, 2001.
- Suhartini, Andewi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- , *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- , *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2010.
- , *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok: Prenadamedia Group, 2017.

- Tim Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Lampung. *Buku Ajar Hukum Tata Negara*. Bandar Lampung: PKKPUU Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015.
- Wahyudi, Slamet Tri. “Problematisasi Penerapan Hukuman Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No. 2, Juli, 2012.
- Yahya, Mukat dan Fatchurrahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islam*. Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1986.
- Zahroni. *Pencegahan Penyalagunaan NAPZA*. Jakarta: Grafindo Awanawan. 1980.
- Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.